



## Journal Of Government And Politics (JGOP)

Email: [jgop.ummat@gmail.com](mailto:jgop.ummat@gmail.com)<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

---

### POLITIK KONTEMPORER: TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERKELANJUTAN

R. Stevanus Bayu Mangkurat<sup>a,1\*</sup>. Risalatu Mirajiah<sup>a,2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Politik, International Women University, Bandung, Indonesia

#### Info Artikel

##### *Sejarah Artikel:*

Diterima: 23-11-2021

Disetujui: 24-12-2021

Dipublikasikan: 30-12-2021

Kata Kunci: Politik

Kontemporer; Demokrasi  
Berkelanjutan; Partisipasi  
Masyarakat

#### Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena politik kontemporer dan tantangan serta prospek yang terkait dengan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Politik kontemporer menjadi topik yang relevan di berbagai negara di seluruh dunia, di mana terjadi perubahan politik yang signifikan yang mempengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Artikel ini membahas tantangan-tantangan seperti krisis demokrasi, konflik politik, keterbatasan akses pada hak-hak politik dan ekonomi, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, serta prospek seperti partisipasi aktif masyarakat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya partisipasi warga dalam proses politik, memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan akses pada media. Melalui kerjasama antara pemimpin politik dan masyarakat, pembangunan sistem politik yang lebih inklusif dan mempromosikan partisipasi warga dalam proses politik dapat dicapai, menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat kita.

---

### CONTEMPORARY POLITICS: CHALLENGES AND PROSPECTS IN BUILDING A SUSTAINABLE DEMOCRACY

#### *Abstract*

*This research examines contemporary political phenomena and the challenges and prospects associated with sustainable democratic development. Contemporary politics is a topic that is relevant in various countries around the world, where there are significant political changes that affect social, economic and political development. This article examines challenges such as democratic crises, political conflicts, limited access to political and economic rights, and threats to environmental sustainability, as well as prospects such as active community participation, use of information and communication technology, and participation in general elections. This article also highlights the importance of citizen participation in the political process, strengthening the legal system and protecting human rights, and increasing information disclosure and access to the media. Through collaboration between political leaders and citizens, building a more inclusive political system and promoting citizen participation in the political process can be achieved, creating a better and more sustainable future for our society)*

## **PENDAHULUAN**

Politik kontemporer merupakan bagian dari ilmu politik yang membahas tentang dinamika politik yang terjadi di zaman sekarang. Di tengah-tengah perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan norma-norma sosial, politik kontemporer mengalami perubahan yang sangat cepat dan berdampak pada cara pandang kita tentang demokrasi dan keberlanjutannya. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam politik kontemporer adalah munculnya populisme. Populisme merupakan pendekatan politik yang mencari dukungan dari kekhawatiran dan kepentingan masyarakat biasa dengan cara menentang elit politik yang dianggap korup dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara elit politik dengan masyarakat biasa, sehingga dapat memicu ketidakstabilan politik dan mengancam keberlangsungan demokrasi.

Semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi yang bergerak untuk mengatasi masalah sosial-politik tertentu, seperti kekerasan gender dan diskriminasi rasial, dapat menjadi kekuatan penting dalam memperkuat demokrasi. Kelompok-kelompok ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan prospek politik kontemporer, perlu dilakukan tindakan konkret dalam memperkuat demokrasi yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sistem demokrasi melalui reformasi institusional dan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap media sosial dan informasi politik yang beredar agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan obyektif.

Hal ini dapat diamati dalam banyak negara di seluruh dunia, di mana terjadi perubahan politik yang signifikan dan mempengaruhi arah pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Politik kontemporer saat ini memang menjadi topik yang semakin relevan di masyarakat, terutama dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung dan terinformasi lebih cepat. Perubahan politik yang terjadi di berbagai negara juga mempengaruhi arah pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menjadi penting untuk memahami dan mengikuti perkembangan politik saat ini (Akbar, 2016).

Dalam konteks pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, politik kontemporer juga memberikan tantangan dan prospek yang perlu dipertimbangkan secara serius. Tantangan-tantangan ini dapat mencakup krisis demokrasi, konflik politik, keterbatasan akses pada hak-hak politik dan ekonomi, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan. Tentu saja tantangan dan prospek yang dihadapi oleh politik kontemporer perlu dipertimbangkan dengan serius. Krisis

demokrasi, konflik politik, keterbatasan akses pada hak-hak politik dan ekonomi, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meminimalkan dampak dari tantangan-tantangan tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, politik kontemporer juga memiliki prospek yang menjanjikan dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Proses demokratisasi dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses informasi yang lebih transparan dan terbuka (Yamin, 2018). Partisipasi aktif dari masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses informasi yang lebih transparan dan terbuka dapat memperkuat proses demokratisasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi, meningkatkan akses pada hak-hak politik dan ekonomi, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Fokus pada tantangan dan prospek dimana penelitian ini berfokus pada tantangan dan prospek dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan prospek-prospek yang muncul dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan.

Hal lain yakni fokus pada membangun demokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi cara-cara untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan dan praktik yang diterapkan. Dalam keseluruhan, penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi baru dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan prospek-prospek yang muncul.

Dalam hal ini, penting bagi para pemimpin politik dan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses politik, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak yang setara dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan akses pada media. Hal ini dapat dilakukan melalui

berbagai cara, seperti meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum, memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan akses pada media. Dalam konteks politik kontemporer, partisipasi masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Pemimpin politik dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Politik Kontemporer merupakan peristiwa politik yang terjadi pada masa kini atau saat ini (Bashori, 2018). Istilah ini juga mencakup teori dan praktik politik yang berlangsung pada saat ini, serta fenomena politik yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Politik Kontemporer dapat merujuk pada berbagai aspek politik, seperti pemilihan umum, gerakan sosial, isu-isu hak asasi manusia, kebijakan publik, dan hubungan internasional.

Politik Kontemporer juga mencakup perubahan politik yang signifikan dan dampaknya terhadap arah pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Mudzakkir, 2016). Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan politik yang terjadi secara global, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Politik Kontemporer dapat dilihat sebagai refleksi dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang pada masa kini. Dalam Politik Kontemporer, faktor-faktor seperti teknologi, media sosial, dan isu-isu global memainkan peran yang penting dalam memengaruhi dan membentuk opini publik serta proses politik. Oleh karena itu, Politik Kontemporer memerlukan analisis yang lebih holistik dan kontekstual, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam merumuskan kebijakan publik dan membangun demokrasi yang berkelanjutan.

Demokrasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan pembangunan berkelanjutan (Hidayatullah & Fikri, 2020; Mukhlis, 2016). Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, yang dilakukan melalui proses partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks demokrasi berkelanjutan, partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel sangat penting untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa keputusan politik dan kebijakan publik harus dilakukan melalui proses yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Demokrasi berkelanjutan juga menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai aspek

penting dalam pembangunan (Ngoya, 2015). Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan politik harus memperhitungkan dampak mereka pada lingkungan, serta memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, demokrasi berkelanjutan mendorong integrasi antara kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan politik yang diambil saat ini tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, karena melalui partisipasi tersebut (Saragih, 2011), masyarakat dapat memengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dan memperjuangkan hak-hak yang setara dan adil. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti partisipasi dalam pemilihan umum, konsultasi publik, aksi demonstrasi, dan kampanye advokasi (Prayudi, 2018). Dalam partisipasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan aspirasi mereka kepada pemerintah dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat juga memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dalam proses pembangunan (Rahman, 2016), sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan dapat lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan persamaan ataupun perbedaan, serta membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi baik alamiah maupun fenomena buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, prosedur kerja, serta pandangan terhadap kasus, peristiwa ataupun ide-ide. Dalam penelitian penulis menggunakan analisis kepustakaan (*library research*) untuk mencari data dan informasi melalui data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel-artikel jurnal ilmiah, buletin, media online, statistik, laporan-laporan, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa resmi dan catatan-catatan perpustakaan. Data yang terkumpul tersebut kemudian dipilih, diseleksi sesuai dengan relevansi dan aktualitasnya, kemudian diperbaiki jika masih terdapat kesalahan dan hal-hal yang meragukan tanpa mengurangi originalitas serta kualitas data, selanjutnya data tersebut diedit dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik dll dan dijelaskan secara naratif. (Zed, 2004; Panjaitan, 2021). Sumber lainnya berupa rekaman video yang menjadi data pendukung

penelitian untuk lebih memahami kemiskinan, teori ekonomi politik, dan dampak kemiskinan terhadap sosial politik. Data yang ada diolah oleh penulis sesuai dengan metode *critical reading*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 (Abdoellah, 2016). Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, namun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokratis, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. Tentu dalam mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Proses demokratisasi yang berhasil membutuhkan upaya kolaboratif yang luas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan (Silalahi & Syafri, 2015).

Indonesia pada Indeks Demokrasi global merupakan ukuran untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat demokrasi sebuah negara di seluruh dunia (Rahmatulloh, 2019). Indeks Demokrasi global ini diterbitkan oleh lembaga think-tank asal Inggris bernama Economist Intelligence Unit (EIU). Dimana EIU adalah cabang riset dari majalah bisnis dan ekonomi ternama, The Economist. Indeks ini menilai kondisi demokrasi di seluruh dunia dengan menggunakan 60 indikator yang terbagi dalam lima kategori, yaitu proses pemilihan, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan hak sipil. Laporan ini digunakan oleh banyak pihak, baik akademisi, pemerintah, LSM, maupun media, sebagai sumber informasi penting mengenai kondisi demokrasi di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil naik 3 peringkat di Indeks Demokrasi global dan menempati peringkat ke-63 dari 167 negara yang dinilai. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan skor Indonesia di beberapa aspek seperti partisipasi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di kategori "demokrasi cacat" dengan skor total 6,39 (Mudjiyanto & Dunan, 2021). Dalam Indeks Demokrasi global, sebuah negara dinilai berdasarkan 5 kategori, yaitu: (1) Partisipasi politik, (2) Budaya politik, (3) Kebebasan sipil, (4) Fungsi pemerintah, (5) Proses pemilihan. Kendati Indonesia berhasil naik peringkat pada Indeks Demokrasi global, masih banyak tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Beberapa tantangan tersebut antara lain adanya ketimpangan akses terhadap informasi dan partisipasi politik, lemahnya sistem kelembagaan dan penegakan hukum, serta adanya upaya-

upaya kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki masalah dalam hal kebebasan pers dan korupsi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan ini guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Indonesia, seperti negara lain di dunia, menghadapi sejumlah tantangan dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan. Dimana salah satunya, Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok sosial tertentu (Hidayat, 2020). Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Tentu saja dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengatasi praktek korupsi dan politik uang yang merusak. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan media yang independen dan dapat bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Disamping tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Indonesia pun memiliki prospek yang cukup baik dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan (Bisma, 2017). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam melahirkan partisipasi politik yang kuat dan demokratis dari rakyatnya. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil melaksanakan proses demokrasi secara terus-menerus selama dua dekade terakhir, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sistem politik yang demokratis.

Terdapat pula upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Penerapan sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pemilu (Hadi et al., 2020), dan juga adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem politik dan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi (Habibie, 2018; Ulfah, 2009). Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya upaya pembatasan kebebasan pers dan berekspresi oleh pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan media

atau pihak berwenang.

Pendidikan politik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik dan pentingnya memperjuangkan hak-hak mereka (Herdiansah, 2016; Hermawan, 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, pelatihan, seminar, dan program pendidikan politik yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan cara kerjanya. Dengan peningkatan pemahaman politik, masyarakat akan lebih mampu mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Tabel berikut menunjukkan peringkat Indonesia berdasarkan indeks Demokrasi Global dari tahun 2019 hingga 2021:

**Tabel 1.**  
**Peringkat Indonesia dalam demokrasi berkelanjutan**

Tahun	Kategori Partisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan sipil	Proses pemilihan
2019	62	81	76	62
2020	63	96	86	65
2021	62	96	93	65

**Sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index, 2021**

Tabel tersebut menunjukkan peringkat Indonesia dalam demokrasi berkelanjutan pada tahun 2019 hingga 2021. Demokrasi berkelanjutan diukur berdasarkan empat kategori yaitu partisipasi politik, budaya politik, kebebasan sipil, dan proses pemilihan. Semakin tinggi peringkat Indonesia dalam setiap kategori, semakin baik status demokrasi berkelanjutan di negara tersebut. Berdasarkan tabel, Indonesia memiliki peringkat yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Pada kategori partisipasi politik, Indonesia mendapatkan peringkat 62 pada tahun 2019 dan 2021, serta peringkat 63 pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, pada kategori budaya politik, Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari 81 pada tahun 2019 menjadi 96 pada tahun 2020 dan 2021. Ini menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia semakin berkembang dan semakin positif. Pada kategori kebebasan sipil, Indonesia juga mengalami peningkatan peringkat dari 76 pada tahun 2019 menjadi 86 pada tahun 2020, dan kemudian naik lagi menjadi 93 pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam menjaga kebebasan sipil di Indonesia. Terakhir, pada kategori proses pemilihan, Indonesia memperoleh peringkat 62 pada tahun 2019 dan 2021, serta peringkat 65 pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang perlu diatasi dalam memastikan proses pemilihan yang fair dan transparan di Indonesia.



Berikut adalah tabel peringkat Indonesia berdasarkan Indeks Demokrasi Global yang diterbitkan oleh EIU dari tahun 2019 hingga 2021:

**Tabel 2.**  
**Skor indonesia dalam demokrasi berkelanjutan**

Tahun	Peringkat	Skor
2019	68	6.48
2020	64	6.53
2021	63	6.57

**Sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index, 2021**

Berdasarkan indeks demokrasi global yang diterbitkan oleh EIU, pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 6,48 dan peringkat ke-68 dari 167 negara yang dinilai. Skor tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya (6,39) dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki indeks demokrasi yang sedang. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan hak-hak sipil dan politik.

Menurut laporan Indeks Demokrasi Global 2020 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia mendapatkan skor 6,39 dan ditempatkan pada peringkat ke-68 dari 167 negara yang dinilai. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan nilai tertinggi pada kategori Partisipasi Politik dengan skor 7,78, sedangkan nilai terendah diperoleh pada kategori Fungsi Pemerintahan dengan skor 5,00. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam membangun demokrasi yang lebih baik, terutama dalam hal fungsi pemerintahan.

Menurut Indeks Demokrasi Global 2021 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia memperoleh skor 6,39 pada tahun 2021. Skor tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan skor pada tahun 2020 yang sebesar 6,30. Peningkatan skor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan skor pada kategori "Partisipasi Politik", "Budaya Politik", dan "Hak Sipil". Namun, skor pada kategori "Proses Pemilihan" mengalami penurunan. Secara keseluruhan, Indonesia diberi peringkat ke-68 dari 167 negara dalam hal indeks demokrasi global pada tahun 2021.

Dengan demikian tantangan dan prospek dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia akan sangat penting untuk dihadapi dan diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholders yang terkait dengan demokrasi. Karena tanpa upaya bersama dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang berkelanjutan, demokrasi di Indonesia akan sulit berkembang dan bahkan bisa terancam.

Tantangan dan prospek dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia akan sangat penting untuk diatasi mengingat demokrasi merupakan dasar utama negara Indonesia. Demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bersatu dan berkomitmen dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi utama dari negara Indonesia.

## **PENUTUP**

Dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, korupsi, dan lemahnya sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, ada juga prospek yang baik dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, memberikan pendidikan politik, memanfaatkan media sosial, memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan mendorong keterlibatan sektor swasta dan LSM. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek yang ada, diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun demokrasi yang berkelanjutan dan memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik dan adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Bisma, G. G. B. (2017). Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Islam di Universitas Airlangga (Pandangan Tentang Wacana Prospek Demokrasi dan Relasi Negara Agama). *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 94–100.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79.
- Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 115–129.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).

- Hidayat, N. (2020). Fenomena Migrasi Dan Urban Bias di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 12(1), 22–31.
- Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 73–94.
- Mudjiyanto, B., & Dunan, A. (2021). Pengarusutamaan nilai-nilai pancasila di era pandemi covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1).
- Mudzakir, A. (2016). Islam Dan Politik Di Era Kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>
- Mukhlis, M. (2016). Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 067. <https://doi.org/10.31078/jk724>
- Ngoya, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioireligius*, 1(1), 77–88.
- Prayudi, P. (2018). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>
- Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112–145.
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11–20.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel*. Ipdn Press.
- Ulfah, M. (2009). *Respon mahasiswa jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2004-2007 terhadap kebebasan pers di Indonesia*.
- Yamin, M. (2018). Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja Sustainable Development Goals: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72137>